

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan, Filosofi, Konsep dan aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 18.
- Arifin, S. (2016). *Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015)*.
- Asikin, M. (2001). *Stakeholder Participation In SME Policy Design And Implementation*. State Ministry for Cooperatives & SME.
- Bassar, E. (2015). Diseminasi informasi publik tentang peringatan dini bencana (Studi kasus penyebaran informasi peringatan dini oleh BMKG kepada pekerja media). *Jurnal Visi Komunikasi*, 14(01), 90–103.
- Bryson, J. (2004). *What to do when stakeholders matter : A guide to stakeholder identification and analysis techniques What To Do When Stakeholders Matter : A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. January 2004, 4.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2005). *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Routledge.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (T. Sujarman (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.
- Goi, C., & Goi, M.-T. (2011). Review on Models and Reasons of Rebranding. *International Conference on Social Science and Humanity*, 5, 445–449.
- Hananto, P. (2014). Opinion Leader versus New Opinion Leader dalam Komunikasi Pemasaran (Studi Kasus Selebtwit di Twitter untuk Komunikasi Pemasaran). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.14710/interaksi.3.2.140-153>
- Herdyansah, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*.
- J. Severin, W., & W. Tankard, J. (2007). *Teori Komunikasi; Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa* (S. Hariyanto (ed.); Edisi Keli). Kencana Jakarta.

- Jesca, C., Kumbirai, M., & Brighton, H. (2014). Destination Rebranding Paradigm in Zimbabwe : a Stakeholder Approach. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 3(1), 30–41.
- K. Yin, R. (2012). *Case Study Research: Design and Methods*. Massachusetts Institute of Technology (D. Mudzakir (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif* (Edisi Kedu). Prenadamedia Group.
- Kusumajanti, Purnama, M., & Priliantini, A. (2018). Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness (Studi Kasus Terkait Larangan Penggunaan Pukat Hela Dan Pukat Trawl Pada Nelayan Di Kepulauan Seribu). *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(3), 116–126.
- Liliwari, A. (2011). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Edisi Pert). Kencana Prenada Media Grup.
- Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. SAGE Publications Ltd.
- Muzellec, L., Lambkin, M., & Doogan, M. (2004). Corporate Rebranding – An Exploratory Review. *Irish Studies Review*, 12(2), 191–199.
<https://doi.org/10.1080/0967088042000228950>
- Nana, S., Mamina, R. T.-, Chiliya, N., & Maziriri, E. T. (2019). The impact of corporate rebranding on brand equity and firm performance. *Journal of Business & Retail Management Research*, 13(04).
<https://doi.org/10.24052/jbrmr/v13is04/art-08>
- Nanda, F., Wirman, W., & Firdaus, M. (2021). Aktivitas Government Public Relations dalam Mengelola Diseminasi Informasi City Branding Kota Pekanbaru. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4, 1–17.
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Ordenez, M., & Serrat, O. (2017). Knowledge Solutions; Disseminating Knowledge Products. In *Knowledge Solutions*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-0983-9>
- Pinheiro, R., & Aires, B. (2017). *The Role of Internal and External Stakeholders*. March 2015. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9570-8>

- Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, S. (2018). Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bandung Barat The Dissemination Model Of Health Communication Information in Rural. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 175–190.
- Setyanto, Y., & Winduwati, S. (2018). Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan (Studi pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 164. <https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.1077>
- Sholikhah, S. (2018). Branding Institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Di Kawasan Pesisir (Studi Multi Situs Di STITMA Tuban Dan IAI Tabah Kranji Paciran Lamongan). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 184–196.
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia*. Kencana Jakarta.
- Ulber, S. (2004). Komunikasi Pemerintahan : Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*, 3(1), 36–54.
- Welch-Ross, M., & Lauren, F. (2007). *Handbook on Communicating and Disseminationg Behavioral Science*. Sage Publication, Inc.

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Logo Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional. 27 Januari 2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. 29 Agustus 2016. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Perangkat Daerah. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah. 19 Desember 2011. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 17 Maret 2009. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 30 Januari 2004. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional. Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 13 Oktober 2010. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. Jakarta.
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Suusunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. 6 Desember 2016. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. Pacitan
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Suusunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan. 6 Desember 2016. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. Pacitan
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2020 Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Suusunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. 25 Mei 2020. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. Pacitan
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. Jakarta
- Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1901 / KPTS / 408.12 / 2019. Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pacitan
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2016 Pelaksanaan Pengalihan Daerah Kabupaten / Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. 23 Maret 2016. Direktur Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. 7 September 2017. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. 23 April 2018. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. 30 September 2014. Lembaga Negara Republik Indonesia. Jakarta

Siaran Pers No. RILIS/142/B4/BKKBN/XII/2019. 2019. Rebranding BKKBN Untuk Millenial Dan Zillenial.
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/rebranding-bkkbn-untuk-millennial-dan-zillenial>

Siaran Pers No. RILIS/01/B4/BKKBN/I/2020. 2020. Logo Baru BKKBN Menuju Cara Baru Untuk Generasi Baru. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/logo-baru-bkkbn-menuju-cara-baru-untuk-generasi-baru>.

Website

BKKBN Pusat. 9 Desember 2019. REBRANDING BKKBN UNTUK MILLENIAL DAN ZILLENIAL. <https://www.bkkbn.go.id/>

BKKBN Pusat. Struktur Organisasi BKKBN
<https://www.bkkbn.go.id/pages/struktur-organisasi>

BKKBN Jawa Barat. 5-03-2020. Rebranding Bikin BKKBN Makin Keren.
<http://jabar.bkkbn.go.id/?p=1486>

DPPKBPPPA Kab. Asahan. 14-09-2020. MENGUKUR KEMAJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG KB.
<https://dppkbpppa.asahankab.go.id/index.php/content/news/mengukur-kemajuan-pelaksanaan-reformasi-birokrasi-bidang-kb>

Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan.
<https://ppkbppa.pacitankab.go.id/category/berita/>